

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA

Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila (Kajian terhadap QS. al-Kafirun dan al-Ikhlâs)

Nuril Fajri

AGAMA DAN POLITIK

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah

POLITIK MODERAT

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH

Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Volume 14, Nomor 1, Januari - Juni 2020

Editor in Chief

Moh Soehadha

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hasan Sazali

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Zuly Qodir

Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya, Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jurnal Sosiologi Agama

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta



DAFTAR ISI

DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA:

**Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila
(Kajian terhadap QS. al-Kōfirūn dan al-Ikhlōs)**

Nuril Fajri..... 1-20

POTRET HARMONI ANTAR SISWA-SISWI BERAGAMA DI SMA TIGA MARET YOGYAKARTA

Muhammad Furqon..... 21-34

AGAMA DAN POLITIK:

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah 35-50

POLITIK MODERAT:

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini 51-66

UGAMO MALIM DALAM DISKURSUS KEAGAMAAN DI HUTATINGGI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Arafat Iskandar Lamahu..... 67-92

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH:

**Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas
Kajian Humaira Surakarta**

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa..... 93-110

100% KATOLIK 100% INDONESIA:

**Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Nasionalisme
Umat Katolik Di Indonesia**

Samudra Eka Cipta 111-124

JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME

Udji Asiyah, Ratna Azis Prasetyo, Sudjak 125-140

POLITIK MODERAT : Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhammadwahdini99@gmail.com



Abstrak

Tulisan ini membahas pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi di bidang politik. Al-Buthi adalah sosok yang dinilai beberapa kalangan kontroversial karena dekat dengan rezim Al-Assad yang notabene mayoritas ulama membenci rezim Al-Assad yang dinilai zalim. Tulisan ini adalah hasil kajian dari beberapa literatur pustaka yang berkaitan dengan Konsepsi politik Al-Buthi. Dalam hal ini Al-Buthi lebih menekankan kepada kemoderatan yang bermuara kepada persatuan suatu negara. Pengalaman sosio-politiknya pada pergulatan permasalahan politik di Suriah membawanya kepada pemikiran yang sangat moderat. Penolakannya terhadap revolusi dan lebih menyetujui reformasi karena perbandingan maslahat daripada keduanya. Al-Buthi lebih menekankan kepada bagaimana politik yang moderat ia mengedepankan terciptanya persatuan pada suatu negara bangsa sehingga kemanfaatan bagi warga negara terpenuhi. Selain penolakannya terhadap cara-cara ekstrim dalam berpolitik dia juga menempatkan keterwakilan perempuan adalah bagian dari suatu pemerintahan.

Kata kunci : politik, moderat, muhammad sa'id ramadhan al-buthi

Abstract

This paper discusses the thoughts of Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi in the political field. Al-Buthi is a figure that is considered by some to be controversial because it is close to the Al-Assad regime, which in fact the majority of scholars hate the Al-Assad regime which is considered wrong. This paper is the result of a study of several literary literature relating to Al-Buthi's political conception. In this case Al-Buthi places more emphasis on moderation which leads to the unity of a country. His socio-political experience in the struggle over political issues

in Suriah led him to very moderate thinking. His rejection of the revolution and more agree with reform because of the comparative advantage of the two. Al-Buthi emphasizes more on how moderate politics he prioritizes the creation of unity in the state of the nation so that its benefits for citizens are met. In addition to his rejection of extreme ways of politics he also placed women's representation as part of a government.

Keywords: political, moderate, muhammad sa'id ramadhan al-buthi



PENDAHULUAN

Membicarakan hubungan agama dan politik adalah proses resiprokal yang satu sama lain memiliki entitas dan keduanya memiliki proses tarik menarik kepentingan. Agama mempunyai fungsi strategis dalam membangun dan memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan pengaturan masyarakat. Sedangkan, negara memakai agama sebagai legitimasi dogmatik untuk membentuk warga negara agar mematuhi negara. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan dominasi saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Negara yang didominasi unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan para pemuka agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampuran unsur teologis dan materialis secara konservatif. Adapun negara yang mendominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler yakni persoalan agama kemudian termarginalkan dan tereduksikan dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara (Wasisto, 2014:134).

Agama Islam sendiri, pada kenyataan sejarahnya selama kurang lebih empat belas abad menunjukkan bahwa diskursus mengenai Islam selalu berjalan beriringan dengan persoalan politik (baca: kenegaraan). Hubungan antara keduanya, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, mendiskripsikan karakteristik Islam. Konstataasi yang terkesan stereotipikal ini bukan karena didorong prasangka subyektif, tetapi lebih didasari oleh obyektifitas sejarah. Pernyataan ini, bagaimanapun juga, menurut Nurcholis Madjid, secara substansial memang mengandung kebenaran. Dan karenanya, menafikan hal tersebut berarti mengingkari kenyataan sejarah sekaligus sebagian dari esensi agama Islam (Iskandar, 2017:2)

Di kalangan para ulama, tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban untuk mendirikan negara. Hanya saja, letak perselisihannya adalah pada derajat kewajiban tersebut, yakni apakah itu berada dalam kategori *wajib syar'i*, *wajib 'aqli* atau keduanya (Al-Mawardi, 2015:5).

Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Siyasah as-Syar'iyyah, hal 168 menjelaskan:

“Wajib diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan. Nabi bersabda: ‘Jika keluar tiga orang untuk bersafar maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin’ (HR. Abu Daud). Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar ma’ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan sholat Ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud.”

Sementara dalam konteks personal lainnya, terdapat banyak tokoh dan intelektual Islam yang mengemukakan fikirannya terkait relasi politik dan agama. Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah tokoh yang patut dikaji, Karena Secara sosio-historis menarik karena berasal dari suriah yang sempat terjadi konflik politik berkepanjangan di negara tersebut. Secara sosial politik, Sai'd Ramadhan Al-Bûthi hidup dalam pergolakan politik yang tidak pernah reda di Suriah, mulai dari imperialium dan kolonialisme Barat di bawah pendudukan Perancis, kemudian konflik politik dengan Mesir, dimana kedua negara ini sempat bersatu menjadi satu negara, namun akhirnya Suriah memisahkan diri lagi sebagai negara sendiri-sendiri, dan juga konflik internal yang terjadi antara kelompok Sunni, Syi'i dan Wahabi di negara tersebut. Dalam politik internasional Suriah adalah negara yang pro Uni Soviet, dan menentang Amerika serta Israel dan mendukung perjuangan pembebasan Palestina (Basith, 2019:46).

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi adalah tokoh Sunni, Ahlussunnah wal Jama'ah kelas dunia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang sufi, namun juga ahli syariat sekaligus ahli hakikat, dan argumentator Sunni terhadap serangan-serangan non-Sunni. Ini diakui baik di Suriah maupun di dunia Muslim lainnya. Disisi lain, Al-Buthi banyak dihujat dan di cerca dan bahkan dianggap munafik, karena pandangan politiknya yang berseberangan dengan para ulama Sunni di Suriah. Dalam krisis politik yang terjadi di Suriah menyebabkan para ulama masuk ke dalam pusaran kekuasaan dan oleh karena itu rawan menyulut kontroversi (Basith, 2019:47).

Dari Kondisi Sosial maupun kontroversialnya sikap politik Al-Buthi muncul beberapa pertanyaan: Bagaimana pemikiran Al-Buthi tentang konsepsi Politik dalam Islam? dan mengapa Al-Buthi mengambil sikap untuk tidak mendukung revolusi Suriah kala itu? Dari literatur-literatur terdahulu disebutkan bahwa Sa'id Ramadhan Al-Buthi memang mempunyai konsep maslahat yang luar biasa. Sehingga dapat dilihat bahwa kemoderatan sikap Al-Buthi patut dikaji dan dilihat. Bagaimana konsepsi-konsepsi politik beliau yang bernuansa kedamaian tersebut.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai secara umum adalah mengetahui konsepsi Politik Islam yang digagas oleh Sa'id Ramadhan Al-Buthi dan apa penyebab beliau mengambil sikap menolak revolusi di Suriah. Adapun metode yang dipakai adalah studi literatur, dimana penulis

mengumpulkan tulisan-tulisan terkait dengan tema untuk dikaji dan ditelisik yang berkenaan dengan Pemikiran Sa'id Ramadhan Al-Buthi tentang komoderatan politiknya. Sejumlah tulisan yang membahas Sa'id Ramadhan Al-Buthi, adalah yaitu Karya Ilmiah yang ditulis oleh Mohd. Mufid yang berisi tentang sejauh mana kontribusi Al-Buthi dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam. Tulisan ini bertumpu kepada hukum pidana Islam sebagai objeknya dan diterbitkan pada jurnal *Al-Jinayah* pada tahun 2018.

Kemudian Karya Ilmiah yang ditulis oleh Abdul Basith dari IAIN Porwekerto yang membahas konsep Al-Buthi dalam melakukan Istinbath hukum. Tulisan ini lebih membahas kepada konsepsi maslahat versi Al-Buthi. Sejauh penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Syaikh Sa'id Ramadhan Al-Bûthi, namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai konsepsi politik Beliau.

BIOGRAFI AL-BUTHI

Muhammad Sa'id ibn Mula Ramadhan ibn Umar al-Bûthi lahir dari keluarga suku Kurdi sunni di desa Jeilka distrik Buthan (Turki) pada tahun 1929 yang merupakan keluarga yang cerdas dan taat beragama. Ayahnya, Syekh Mula Ramadhan merupakan salah satu tokoh ulama besar di Turki, termasuk di Suriah. Sesaat setelah peristiwa kudeta yang dilancarkan oleh Kemal al-Taturk, ia pindah ke Suriah bersama ayahnya dan ia baru berusia empat tahun. Guru pertama baginya adalah ayahnya sendiri, ayahnya pula yang memulai menanamkan pendidikan yang bermanfaat dan membesarkannya dengan wawasan keilmuan yang tinggi. Dengan segala kecerdasannya, Sa'id sendiri haus akan ilmu dan memiliki ingatan yang mengagumkan (Basith, 2019:45).

Pada Umur 4 tahun beliau pindah bersama ayahnya Mala Ramadhan ke Damaskus, Selanjutnya Pada tahun 1953 Sa'id Ramadhan Al Buthi setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah kemudian ayahnya mandaftarkannya di Ma'had ulTaujih al-Islamy (Institute of Islamic Guidance) di daerah Meidan, Damaskus (Al-Buthi, 2013:219). Di bawah pengawasan seorang maha guru Hasan Habannakeh (ulama besar Syam). Ia banyak melahirkan ulama terkenal dan merupakan penyumbang kepada ketajaman ilmu al-Bulhi, dan ulama sejawat lainnya seperti; Mustafa Al Bugha, Mustafa Saed Al Khen, Muhammad Al Zuhaily dan banyak lagi ulama tersohor. Al-Buthi di latih berkhotbah dan mulai menyampaikan khutbah berdekatan dengan Jami' Manjak ketika umur beliau baru 17 tahun. Beliau juga dilatih ilmu perdebatan menghadapi pemikiran atheis dan ahli bid'ah, kecerdasan, ketajaman pemikiran dan kemahiran berdebat Al-Bulhi menjadikan beliau terkenal di Suriah ialah apabila beliau berdebat dengan seorang yang berfahaman sekular seperti Dr. Taib Tizniy, dan lain sebagainya (Latif, 2019:24).

Sa'id Ramadhan Al Buthi kemudian menuju Kairo dan meneruskan studinya dengan spesialisasi ilmu Syariah hingga memperoleh Ijazah *Licence* (tingkat sarjana pada tahun 1955).

Tahun berikutnya ia meraih pendidikan (setingkat S2) di Fakultas Bahasa Arab dari Universitas Al Azhar. Pada tahun 1965, Sa'id Ramadhan menyelesaikan program Doktornya di Universitas AlAzhar bidang Epistemologi Hukum Islam dengan predikat *Mumtaz Syaf'Ula*. Disertasi yang ia tulis dan berjudul "*Dlawabit alMashlahah fi asy-Syari'at al-Islamiyyah*," mendapatkan rekomendasi Jami'ah al-Azhar sebagai "Karya Tulis yang Layak Dipublikasikan." kewibawaan beliau sebagai ulama *Ahli Sunnah Wa Al-jamaah* terus diasah oleh ulama ulama al Azhar, sehingga studi beliau berhasil diperingkat doktor falsafah (kajian ini berkisar mengenai tesis beliau). Al-Buthi sempat berguru dengan ulama besar yang terkenal dengan kealimannya seperti Mahmud Shaltut dan Mustafa Abdul Khalid dan yang lain (Latif, 2019:24).

Pada tahun 1970 ia berhasil meraih gelar asisten professor, dan di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar profesor. Di tahun 1965 juga setelah keberhasilannya meraih gelar Doktor, ia langsung dipercaya menjabat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. dan di tahun 1977 ia dipercaya menjabat Dekan. Di tahun 2002 ia diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di universitas tersebut. Juga ia merangkap sebagai anggota organisasi pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di Oman, juga sebagai Anggota Majelis Akademik Univ. Oxford. Seorang yang menguasai 4 bahasa, yaitu Arab, Turki, Kurdi dan Inggris. Selain aktivitas diberbagai jabatan diatas, beliau juga membina majelis ta'lim di beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jamaah.

Al-Buthi tidak hanya seorang yang cerdas di sektor syari'ah dan bahasa, beliau juga dikenal sebagai ulama Sunni yang multidisipliner. Ia dikenal alim dalam ilmu filsafat dan akidah, menguasai *ulumul Qur'an* dan *ulumul hadits* dengan baik. Bahkan terkadang ia melakukan kritik atas pemikiran filsafat materialisme Barat, di sisi lain ia juga melakukan pembelaan atas ajaran dan pemikiran madzhab fiqh dan *aqidah ahlussunnah* (Mukit, 2015:15).

Beliau wafat secara syahid pada kamis malam jum'at tanggal 21 Maret 2013 di masjid Jamik al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang memimpin majlis kajian rutin kitab "*al-Hikam Ibn Athaillah al-Sakandari*" (Abbas, 2013:89). Syaikh Al Buthi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya mencapai lebih dari 60 buah, meliputi bidang syari'ah, sastra, filsafat, sosial, masalah-masalah kebudayaan, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang dapat disebutkan di sini, antara lain:

1. Al Mar'ah Bayn Thughyan An Nizham Al Gharbiyy wa Latha'if At Tasyri' Ar Rabbaniyy
2. Al Islam wa Al 'Ashr
3. Awrubah min At Tiqniyyah ila Ar Ruhaniyyah: Musykilah Al Jisr Al Maqthu'
4. Barnamij Dirasah Qur'aniyyah
5. Syakhshiyyat Istawqafatni
6. Syarh wa Tahlil Al Hikam Al 'Atha'iyah
7. Kubra Al Yaqiniyyat Al Kauniyyah

8. Hadzihi Musykilatuhum
9. Wa Hadzihi Musykilatuna
10. Kalimat fi Munasabat
11. Musyawarat Ijtima'iyyah min Hishad Al Internet
12. Ma'a An Nas Musyawarat wa Fatawa
13. Manhaj Al Hadharah Al Insaniyyah fi Al Qur'an
14. Hadza Ma Qultuhu Amama Ba'dh Ar Ru'asa' wa Al Muluk
15. Yughalithunaka Idz Yaqulun
16. Min Al Fikr wa Al Qalb
17. La Ya'tihi Al Bathil
18. Fiqh As Sirah
19. Al Hubb fi Al Qur'an wa Dawr Al Hubb fi Hayah Al Insan
20. Al Islam Maladz Kull Al Mujtama'at Al Insaniyyah
21. Azh Zhullamiyyun wa An Nuraniyyun
22. Muhadharat Fil Fiqhil Muqharin Ma'a Muqaddimati Fi Bayani Asbabi Ikhtilafi Al Fuqaha' Wa Ahammiyyati Dirasatil Fiqhil Muqarin
23. Al Islam Maladz Kulli Mujtama'at Insaniyyah; Limadza Wa Kaifa?
24. Al Jihad Fil Islam; Kaifa Nafhamuhu? Wa Kaifa Numarisuhu?
25. Salafiyyah; Marhalah Zamaniyyah Mubarakah La Madzhab Islami
26. Al 'Uqhubat Islamiyyah; wa 'Aqduhu At Tanaqhudhu bainaha Wa baina Ma Yusamma bi Thabi'ihal 'Ashri
27. Hurriyatul Insan Fi Dhilli 'Ubudiyyahatihi Lillah
28. Difa' 'An Islam Wa Tarikh
29. Al Islam Wa 'Asru; Tahaddiyat Wa 'Afaq
30. Al Aqidah Al Islamiyyah wa Al Fikr al Mu'asirah
31. Al La Madzhabiyyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu as Syari'ah Al Islamiyyah
32. Al Mazdhab al Iqtishady Baina Syuyu'iyyah Wal Islam
33. Dhawabitu Al Maslahat Fi As Syariah al Islamiyyah
34. Fi Sabilillahi Wa Al Haq
35. Hiwar Haula Musykilati Hadhariyyah
36. Mabahitsul Kitab Wa As Sunnah min 'Ilmi Ushulil Fiqhi
37. Mamuzain, Qishatu Hubbub Nabati Fi Al Ardhi wa Aina'u fi As Sama', Mutarjamah
38. Manhaj Al 'Audah Ilal Islam
39. Masalatu Tahdidi an Nashli Wiqayatn wa 'Ilajan
40. Min Al fikri wa Al Qalbi
41. Min Rawaiyl Qur'an
42. Naqdul Auhami Al Maddiyah Al Jadaliyah
43. Tajribatut Tarbiyah Al Islamiyyah Fi Mizan Al Bahts
44. Al Insan Wa Adatullahi Fi Al Ardli

45. Al Islamu Wa Muskilatus sabab
46. Bathinul Ismi al Khatar Fi Hayatl Muslimin
47. Hakadza Fal Nad'u al Islam
48. Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah
49. Man Huwa Sayyidu al Qadri fi Hayatil Insan
50. Minal Mas'ul 'An Takhallufi Al Muslimin
51. Min Asrari Al Manhaj Al Islami

PEMBAHASAN

Agama dan Politik

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan budaya masyarakat, setumpuk problematika kehidupan muncul kepermukaan. Mulai dari permasalahan masyarakat kalangan bawah sampai pada kalangan atas. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, ekonomi, hingga sosial-politik. Semua itu memerlukan jawaban yang mapan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat manusia dengan misi utamanya "*rahmatan lil alamin*" (Ipandang, 2015:164). Pada konteks sosioal-politik, Sa'id Ramadhan Al-Buthi hadir dengan pemikiran-pemikirannya yang menarik serta sikap politiknya yang menarik untuk dicermati.

Melalui karya-karya tulisannya maupun pilihan politiknya ketika semasa hidupnya di negara yang notabene kondisi politiknya carut marut. Al-Buthi adalah ulama yang tidak menutup diri terhadap politik, Al-Buthi menyatakan bahwa di mana terdapat kemaslahatan, maka di situlah hukum Allah. Oleh karena itu, lanjutnya, tidak patut kita berbuat kaku kepada *nash-nash* dan fatwa-fatwa terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan kekinian (Al-Buthi, 1986:12). Walaupun berkali-kali beliau menegaskan bahwa beliau bukan sosok politisi praktis dan bukan pengurus organisasi yang memiliki suatu kepentingan didalamnya (IASI,2018:186).

Secara sosio-historis masa kecil Al-Buthi di Suriah dilewati dengan kondisi sosial politik yang amburadul. Pemerintahan Shukri Al-Quwatli di Suriah saat Al-Buthi tiba di Suriah penuh dengan keotoriteran yang membuat rakyat sengsara. Al-Quwatli kemudian digulingkan oleh kolonel Husni Zain yang kemudian menjadi presiden hanya dalam kurun waktu empat setengah bulan karena Zain sendiri digulingkan oleh Kolonel Sami Hinnawi. Tidak lama kemudian Hinnawi dikudeta oleh kolonel adib Shishakli pada tahun 1950. Shishakli memerintah Suriah dengan tangan besi. Segala bentuk perlawanan terhadap pemerintahannya diberangus. Pada tahun 1951 dia melarang partai politik, persatuan pelajar dan perkumpulan pekerja.

Pola pemerintahan Shishakli pada akhirnya membuat seluruh rakyat Suriah muak dan melakukan pemberontakan. Dengan didukung oleh element angkatan bersenjata, Shishakli berhasil diturunkan dan pemerintahan Suriah sekali lagi berganti kepada pemerintahan sipil pada

tahun 1954. Pada masa pemerintahan sipil ini partai-partai politik bermunculan salah satu yang terkuat adalah partai Ba'ath yang didirikan oleh Michel Aflaq dan Salahuddin Al Bittar. Sebagai partai yang mengusung gerakan sosialisme dan nasionalisme arab, partai Ba'ath membuat warga Suriah tertarik untuk bergabung. Salah satu yang bergabung adalah Hafizh Al-Assad yang menjadi kader sejak bangku sekolah menengah atas. Al-Assad kemudian menjadi Presiden dalam kurun waktu yang lama dan sistem kepemimpinan yang otoriter (Widyarsa, 2012:278)

Kondisi umat Islam modern dimasa hidup al-Buthi dapat diklasifikasikan kedalam dua tantangan: *Pertama* tantangan eksternal, berupa hegemoni peradaban barat terhadap umat Islam. Kondisi ini yang kemudian mendorong sebagian pemikir muslim berasumsi bahwa demi mengejar ketertinggalan peradaban di dunia Islam modern ini, umat Islam harus segera mengadopsi peradaban barat, sebagaimana barat pernah mengadopsi peradaban Islam pada priode klasik. Dalam banyak tulisan Al-Buthi, beliau menolak inferioritas terhadap peradaban barat, tetapi sebaliknya beliau menanamkan spirit optimistis dan sikap superioritas Islam bagi kaum muda muslim. Meskipun disisi lain, Al-Buthi sebagaimana dikemukakan oleh Andreas Christmann, beliau mengakui adanya saling ketergantungan di era pascamodern antara Islam dan barat. Oleh karenanya umat Islam mempunyai hak untuk mengadopsi peradaban barat yang terbukti baik dan bermanfaat secara selektif.

Tantangan *kedua*, berupa problem internal dengan munculnya gerakan yang berhaluan ekstremis-fanatis dan gerakan liberal dalam pemikiran Islam. Dalam hal ini pembelaan Al-Buthi terhadap teknik yurisprudensi Islam yang ilmiah dan tradisional versus pendirian yang terlalu liberal dan relatifis menjadi *concern* utamanya dalam kapasitasnya sebagai sarjana muslim kontemporer. Tidak hanya itu Al-Buthi juga menyerang pendirian kaum salafiyah radikal yang berusaha mendekonstruksi madzhab fikih, atau dengan kata lain menyederhanakan tuntutan ijtihad yang kompleks (Mufid, 2018:31-32).

Dalam konteks pemikirannya mengenai agama dan politik, Al-Buthi mengkonsepsi sebuah negara harus terintegrasi dengan hukum hukum Allah. Tetapi konsepnya tidak mereduksi bentuk negara akan tetapi hanya menetapkan bahwa sebuah negara harus berprinsipkan Islam. Seperti yang dikemukakannya dalam kitab *al-Jihadfi al-Islam, Kaifa Nafhamuhu waKaifa Numatisuhu*. Bagaimanapun juga, negara nasional muslim bukan merupakan negara Islam jika tidak memakai metode pemerintahan Islami. Negaranasional muslim hanya dapat dinyatakan sebagai negara Islam apabila konstitusinya benar-benar patuh kepada prinsip-prinsip kedaiwatan penuh Allah dan keunggulan syariah (Al-Buthi, 1993:80).

Dalam sebuah Darul Islam, masyarakat yang hidup di dalamnya tidak harus semuanya beragama Islam. Tetapi para penganut berbagai agama yang merupakan umat-umat yang berlainan bisa berhimpun dalam sebuah *Al-Mujtama' Al-Islamy* (masyarakat Islam), yaitu

المجموعة أو الطائفة الخاضعة للنظام السلطوي الذي رسمه الله عز وجل لعباده لينسق العلاقة السارية فيما بينهم وليجمعهم على ميزان من العدل

Kelompok masyarakat yang tunduk kepada aturan kekuasaan yang digariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk mengatur hubungan antara mereka dan untuk menghimpun mereka dalam aturan yang adil (Al-Buthi, 1993:84-85).

Politik Moderat

Era 1990-an, Al Buthi telah menunjukkan intelektualitasnya dengan menggunakan sarana media informasi, seperti televisi dan radio. Ini demi mengusung pemikiran-pemikirannya yang *tawassuth* (menengah) di tengah gerakan-gerakan Islam yang bermunculan. Pada saat prahara Revolusi Musim Semi Suriah 2011 hingga kini untuk menggulingkan pemerintahan Basyar Al Assad, secara mengejutkan ia mengambil sikap yang berseberangan dengan kelompok Islamis lainnya. Secara politis ia mendukung rezim Basyar Al Assad dan sekutunya Hizbullah Lebanon. Salah seorang murid beliau menjelaskan bahwa keputusan Syaikh Al Buthi tidak mendukung revolusi adalah karena ia tidak menyetujui cara-cara kekerasan atau perang yang dilakukan aktivis Islam dan mujahidin dari *Ikhwanul Muslimin*, Salafi, Al Qaidah, dan lainnya. Ia memandang bahwa revolusi berdarah memiliki mudharat yang lebih besar daripada menanggung kezhaliman rezim Basyar Al Assad.

Al-Buthi merupakan sosok ulama yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terutama dengan hal yang menyangkut keutuhan negaranya, Suriah. Ia bahkan pernah dituduh menjadi antek rezim, bahkan dituduh sebagai Syiah karena membela Bashar al-Asad ketika para ulama lain berbondong-bondong ingin mengkedetanya (Nur Hasan, 2018:1) Al-Buthi menyetujui perubahan rezim dan perbaikan pemerintahan Suriah yang dilakukan secara damai melalui reformasi dan bukan revolusi. Atas sikapnya tersebut ia mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan dan mendapat dukungan dari kalangan yang lain.

Salah satu sikap politiknya yang sangat fenomenal pada tahun 1985 orang-orang menilai beliau mempunyai hubungan khusus dengan dengan Presiden Suriah Hafidz Al-Assad. Padahal, rezim saat itu sangat dibenci oleh kaum muslimin. Presiden yang awalnya sangat keras terhadap gerakan Islam dengan strategi kedekatan itulah membuat pemerintah mau membebaskan puluhan tahanan politik aktivis Islam terutama golongan *Ikhwanul Muslimin*. Peristiwa ini membuat *Ikhwanul Muslimin* yang awalnya megkritik keras kedekatan Al-Buthi dengan rezim berbaik memberikan penghormatan (IASI,2018:187).

Penolakan Al-Buthi terhadap revolusi dan lebih menyetujui reformasi di Suria, sejatinya al Buthi memikirkan masalah dari pada hal tersebut konsep maslahat yang Ia kemukakan dengan

memberi lima batasan terhadap maslahat ketika diaplikasikan sebagai metode ijtihad, yaitu: *Pertama*; tercakup dalam *maqâshid as- syâri*“, *Kedua* ; tidak bertentangan dengan al-kitab, *Ketiga*; tidak bertentangan dengan hadits, *Keempat*; tidak bertentangan dengan *qiyâs*, *Kelima*; tidak mengeliminir maslahat yang lebih penting prioritasnya (Basith, 2019:47). Konsep Politik Al-Buthi ini, mengedepankan terciptanya persatuan pada suatu negara bangsa sehingga kemanfaatan bagi warga negara terpenuhi. Sikap politik yang dinilai kontroversial oleh beberapa kalangan sejatinya adalah sebuah strategi untuk menemukan jalan lain selain adanya pertumpahan darah untuk perbaikan pemerintahan Suriah kala itu.

Berbicara tentang persatuan, menarik untuk dikemukakan pendapat daripada al-Buthi bahwa suatu bangsa, umat, dan Negara tidak akan berdiri tegak bila di dalamnya tidak terdapat persatuan di antara warganya. Menurutnya, ada dua unsur yang dapat menjadi perekat persatuan, yaitu adanya rasa kasih sayang dan keinginan untuk saling bekerjasama. Pendapat al-Buthi tersebut amat selaras dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Husain Haykal bahwa persatuan umat di masa Nabi dibina di atas landasan persaudaraan dan cinta kasih. Sebab itu, pada hakekatnya seluruh umat Islam, baik di negeri Barat mahupun di Timur adalah bersaudara. Mereka semestinya saling mencintai untuk mendapatkan ridho daripada Allah yang telah menjadikan mereka sebagai umat yang satu yang bermatlamatkan kepada perdamaian (Al-Buthi, 1991:51).

Al Buthi sangat mengedepankan asas moderat dengan esensi humanis dalam aspek kehidupan manusia termasuk dalam dunia politik. Hal ini terungkap ketika beliau di tanya, Apa makna bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi? Beliau menjawab ”*Maknanya adalah bahwa Anda diberi mandat dari Allah untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya, mengajak pada syariat-Nya dan mengingatkan perintah-perintah-Nya, serta mendirikan masyarakat yang humanis di atas dasar keadilan yang nilai-nilai pertimbangannya diserahkan kepada Anda*” (IASI,2018:134).

Menolak Ekstremisme

Sikap politik yang ditunjukkan Al-Buthi semasa hidupnya maupun pada tulisan-tulisan karyanya, menggambarkan bahwa Al-Buthi adalah sosok yang menolak faham-faham ekstremis baik dalam beragama maupun dalam perpolitikan. Di Indonesia, karyanya yang paling banyak digemari adalah *Fiqh As Sirah*. Kitab ini mengupas tentang faidah-faidah yang dapat dipetik dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, utamanya dari sisi dakwah dan mendirikan peradaban Islam (Shabra, 2013:1). Bahkan, karena kitab ini sering dijadikan rujukan oleh aktivis *Ikhwanul Muslimin*, banyak yang menyangka bahwa beliau adalah tokoh Ikhwan, padahal bukan. Dan beliau sendiri pernah berselisih pendapat dengan Ikhwan. Selain itu banyak juga yang menyangka bahwa beliau adalah menantu Syaikh Hasan Al Banna, pendiri *Ikhwanul Muslimin*, karena kebetulan namanya mirip dengan Ustadz Sa’id Ramadhan yang pernah tinggal di Suriah dan meninggal 1995.

Penolakan terhadap ekstremisme yang dilakukan oleh Al-Buthi tidak lain adalah dari pengalaman panjang hidup beliau. Selain historis yang dikemukakan diatas, Al-Buthi pernah menyaksikan tragedi berdarah pada tahun 1979 M, tentang kasus pembunuhan seorang Alawi terkemuka dan serangan kepada pemerintah, kantor-kantor partai Bats, kantor-kantor polisi, dan unit-unit militer oleh ikhwan dan kelompok-kelompok radikal lainnya (Mufid, 2018:35). Bagi Al-Buthi selama penguasa tidak berbuat sesuatu yang menjadikan ia termasuk orang kafir maka haram hukumnya memerangi penguasa tersebut (Bughat) beliau mengutip perkataan imam Nawawi dengan syarah muslimnya “....adapun keluar dari penguasa dan memeranginya adalah perbuatan haram secara ijma’, meskipun penguasa tersebut berbuat fasik dan zalim. Banyak hadits yang menyebutkan hal itu. Kalangan ahlussunnah sepakat bahwa seorang penguasa (Sulthan) tidak digulingkan kekuasannya sebab kefasikannya. Adapun pendapat yang membolehkannya adalah pendapat Mu’tazilah (Mufid, 2018:35).

Termasuk melakukan penyerangan kepada lawan tidak dibenarkan jika tidak ada sebab yang mengharuskan seperti adanya ancaman yang jelas atau nyata. Seperti yang beliau kemukakan, *“Kekufuran merupakan salah satu faktor penyerangan, tetapi dengan syarat adanya permusuhan atau ancaman yang nyata. Jika syarat tersebut tidak ada, maka tidak ada alasan untuk menyerang. Perumpaannya adalah harta yang telah mencapai nisab, ini merupakan faktor dikeluarkannya zakat, tetapi dengan syarat telah mencapai dua haul, haul harta yang telah mencapai satu nisab. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakatnya”*(Buku 145).

Al-Buthi juga pernah mengkritik keras gerakan perlawanan aktivis muslim di Al-Jazair. Kritik itu beliau tulis dalam buku *“Al-Jihad Fil Islam”*, yang kemudian banyak kalangan yang menentang pendapat beliau. Namun pada akhirnya menyetujui pendapat beliau setelah tiga tahun ternyata gerakan itu dimotori oleh intelejen Prancis. (IASI,2018:187). Lebih lanjut, bagi Al-Buthi dakwah yang kuat tidak berarti tindakan fanatik dan keras. Pada saat yang sama, Al-Buthi juga merasa simpati terhadap korban penindasan dan eksploitasi yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Al-Buthi secara tegas menyeru kepada pemerintah rezim al-Assad untuk menghentikan serangan-serangan “membabi buta” yang dapat merenggut nyawa rakyat sipil yang tidak berdosa.

Disinilah, letak kelebihan Al-Buthi dalam menyikapi konflik krisis yang terjadi di Suriah, dengan sangat jeli dan proporsional. Gagasan utama Al-Buthi dalam karyanya *Al-Jihad Fi Al-Islam: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu* adalah ingin menciptakan dakwah Islam sebagai dakwah yang mendidik dan anti kekerasan. Dengan demikian dakwah Islam yang mendorong jiwa yang suci dan hati yang tercerahkan, sadar dan terdidik akan memperkuat negara-bangsa untuk menegakkan perdaban Islam yang sejati. Pada saat yang sama, hal tersebut juga akan memperkuat negara-bangsa terhadap upaya-upaya neokolonialis akan meraih kendali kembali atas negaranya (Mufid, 2018:36)

Selain menolak paham ekstrimis, Al-Buthi juga memberi ruang terhadap konsep toleransi terhadap pemikirannya. Dalam mendefinisikan negara Islam, Al-Buthi menempatkan rakyat non muslim untuk dirangkul dengan dasar keadilan. Al-Buthi melihat sejarah bagaimana Rasulullah melakukan konsepsi dakwah salah satu yang fenomenal adalah ketika Raja Najasi memeluk Islam karena keluwesan ajaran Islam. Pemikiran tersebut sejatinya sejalan dengan konsep masalah yang beliau kemukakan, yaitu mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Sementara manfaat adalah kenikmatan dan yang menjadi jalannya dan menolak rasa sakit dan yang menjadi penghantarnya (Al-Buthi, 2005:131).

Islam mengakui betapa pentingnya keberadaan pemimpin dalam sebuah kelompok, bagaimana dan apapun kelompok itu adanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: “sekiranya ada tiga orang atau lebih dalam sebuah perjalanan, hendaklah seorang di antaranya bertindak sebagai kepala rombongan (pemimpin) (Al-Buthi, 2002:109).

Keterwakilan Perempuan

Mengenai hak untuk menduduki jabatan penguasa bagi perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Sebagian ada yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali. Yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan ini, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa seperti ini hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan fisik dan psikis yang berbeda untuk mempersiapkan mereka menjalankan peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam masyarakat.

Jika perempuan memikul jabatan penguasa, maka ia dituntut untuk terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan pembauran yang bebas dan interaksi sosial dalam jumlah jam yang panjang dengan kaum laki-laki, dan ini dilarang dalam Islam. Urusan-urusan penting yang harus diselesaikan oleh penguasa tidak hanya dalam masalah kenegaraan saja, tetapi juga dalam masalah keagamaan. Di antara masalah keagamaan ini adalah mengumpulkan manusia untuk menunaikan shalat Jum'ah dan berkhotbah, dan ini amat sulit dilakukan perempuan, karena perempuan tidak dituntut untuk melakukan shalat Jum'ah. Begitu juga halnya dalam melakukan shalat '*id* dan shalat *istisqa*'. Tugas penguasa yang lain adalah mengumumkan keadaan darurat perang serta memimpin pasukan melawan musuh (al-Buthi, 2005: 66).

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi mengemukakan sebagian pandangan orang-orang jahiliyah terhadap perempuan. Ia mengemukakan bahwa orang-orang jahiliyah memandang perempuan sebagai rahasia yang harus disembunyikan. Hubungan mereka dengan laki-laki secara terang-terangan akan menjatuhkan martabat kaum laki-laki. Salah satu kewajiban suami-pada

masa jahiliyah klasik adalah menjaga agar jangan sampai orang lain di luar rumah mengetahui nama istrinya dan lain-lain (al-Buthi, 1996: 194)

Al Buthi mengemukakan bahwa, Agama Islam sangat menghormati hak-hak perempuan, termasuk hak berkisah di ranah publik. Hal tersebut terlihat pada beberapa pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang menyatakan bahwa perempuan memiliki seperangkat hak seperti hak untuk berprofesi, hak untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga hak untuk berpolitik (Al-Buthi, 2008:81-85). Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam setiap masyarakat sama dengan laki-laki, sama-sama memiliki hak yang dapat mereka nikmati, demikian pula tiap-tiap dari mereka dibebani kewajiban. Perbedaan mereka terletak pada ada atau tidaknya persamaan (Al-Buthi, 2005:10) Islam adalah agama fitrah.

Hukum-hukumnya memberikan ganjaran sempurna terhadap fitrah kemanusiaan dan telah menjadi suatu kewajiban bagi Islam untuk memusakan kesenangan ini bagi pemeluknya baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan tidak melihat segi kebutuhan atau ketiadaannya (al-Buthi, 2005: 231). Wanita seperti Asma bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang wanita dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah nabi (Al-Buthi, 1990:52).

Sa'id Ramadhan Al-Buthi mengungkapkan bahwasanya "*Boleh bagi perempuan untuk memimpin urusan umat Islam pada semua level kecuali puncak kepemimpinan tertinggi. Ulama berbeda pendapat mengenai kepemimpinannya dalam pengadilan*"(Buku 134). Terbukti dari sejarah bahwasanya ketika itu Umar bin Khatab pernah menugaskan seorang perempuan untuk menjadi bendahara pasar. Sebagaimana telah dikatakan pula dari Ibn Hazm khusus untuk jabatan kepala negara perempuan tidak boleh menduduki jabatan tersebut, alasan yang diungkapkan bukan saja karena hadis nabi sebagai pendukungnya, akan tetapi juga dilihat dari analisis sudut pandang hukum dan psikologisnya (Masrurah, 2017: 18).

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada di atas dapat disimpulkan bahwa, Konsepsi Politik Syekh Sa'id Ramadhan Al-Buthi adalah konsep politik moderat. Hal itu dilatar belakangi oleh pengalaman sosio-politik semasa hidup beliau terutama kehidupan sosio-politik di Suriah. Pada konteks negara bangsa, Al-Buthi memiliki pemikiran bahwa sebuah Negara harus memiliki keintegrasian dengan hukum-hukum Allah. Namun Al-Buthi tidak membatasi bentuk dari negara itu sendiri. Selain itu warga negara non muslim juga harus mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil di sebuah negara menurut konsepnya.

Penolakan Al-Buthi terhadap revolusi yang digaungkan banyak kalangan di suriah tidak lepas dari pemikiran politik moderat yang beliau miliki serta konsep masalah yang beliau

miliki. Politik moderat dalam konsep beliau adalah menolak cara-cara ekstrim dalam melakukan perubahan. Al-Buthi lebih sepakat adanya reformasi, karena cenderung tidak akan terjadi pertumpahan darah yang terjadi.

Al-Buthi juga meletakkan keterwakilan perempuan pada konsepsi politik beliau. Sehingga beliau menempatkan kebolehan perempuan untuk menjadi anggota legislatif atau dalam konteks pemerintahan lainnya. Peran Asma binti Abu Bakar pada saat dakwah Rasulullah SAW yang beliau contohkan secara konkrit sebagai sebuah rujukan.



Bibliografi

- Abdul, Mukit. 2015. *Pendidikan Akidah Telaah Pemikiran Al-Buthi*. Jurnal TAWAZUN Volume 8 No. 1 Januari – Juni 2015.
- Al Mawardi. 2015. *al Ahkam Sulthaniyah*. Beirut. Dar el Fikr.
- Arfan. Abbas. 2013. *Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî de Jure*. Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 5 Nomor 1 Juni 2013
- Basith, Abdul. 2019. *Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al Buthi*. IAIN Purwekorto.
- Ikatan Alumni Syam Indonesia. 2018. *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan Said Ramadhan Al-Buthi*. Bantul: Adisso Publishing.
- Ipandang. 2015. *Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)* Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 2, Juli, 2015.
- Iskandar. 2017. *Konsepsi Negara Dalam Islam (Sebuah Diskursus Politik Hukum Islam)* Asy-Syar’iyyah, Vol. 2, No.1, Juni 2017.
- Latif, Muhammad. 2019. *Konsep Cinta “Al Hubb” Menurut M. Quraish Shihab Dan M. Said Ramadhan Al Buthi*. skripsi IAIN Salatiga
- Masrurah, W. 2017. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir Tematik Alqur’an Dan Hadits,” vol. 2, p. 18, 2017.
- Mufid, Mohd. 2018. *Kontribusi Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam Al-Jinâyah*: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2018.
- Nur, Hasan. 2019. dalam <https://Islami.co/said-ramadhan-al-buthi-ulama-yang-menjadi-musuh-gerakan-oposisi>, di akses senin 18 november 2019 Pukul 09.25;
- <http://fmadani.com/biografi-syaikh-muhammad-said-ramadhan-al-buthi>, di akses senin 18 november 2019 Pukul 09.40;
- Raharjo, Wasisto. 2014. *Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama*. Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014.
- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 1993. *Al-Jihad Fi al-Islam*. Damaskus: Dar alFikr.

- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 1986. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyah*. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 2005. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyah*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 1991. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyah, al-Sirah Nabawiyah* Jakarta: Robbani.
- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 2002. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam, terj. oleh Darsim Ermaya Imam Fajruddin dari al-Mar'ah Baina at-Tugyan an Nizhamiyyah al-Gharbi wa Lithaif at-Tasyri' ar-Rabbani*. Solo: Era Intermedia.
- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 2005. *Perempuan dalam pandangan hukum barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press.
- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 2008. *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ramadhan, Al-Buthi Muhammad Said. 2005. *Menampar Propaganda "Kembali Kepada Qur'an"*.
- Rashidi, Muhammad. 2014. *Ketokohan al-alamah Muhammad Said Ramadan alButhi : sebuah sorotan Berkitan Biografi, Sumbangan, Pengiktirafan dan beberapa aspek*.
- Widyarsa, Mohammad Riza. 2012. *Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya* , Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1 No IV September, 2012.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

